

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Gunawan, Widjaja dan Muljadi kartini, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Hartono, Sunarjati, 1971, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung, Alumni
- Huda, Ni'mahtul, 2005, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda
- Murniatmo Gatut, Murianto Wiwoho, Krisnanto, Poliman, Suhatno, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta, Departemen Pendidikan & Kebudayaan
- Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Salindeho, John, 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sarjita, 2005, *Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press

_____, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Soetoprawiro, Koerniamanto, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Landrefrom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2701

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975.

C. Tesis

Westi Agraristanti, 2009, *“Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Nonpribumi Setelah Berlakunya Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Tesis, Magiser Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

Ida Ayu Putu Ratnayanti, 2012, *“Perjanjian Penguasaan Tanah Hak Milik antara WNA dan WNI Secara Notariil Sebagai Suatu Bentuk Penyelundupan Hukum”*, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

Nyoman Sumardika, 2007, *“Penguasaan Tanah Oleh WNA di Kabupaten Bandung”*, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

D. Internet

<http://jokopas.blogspot.com/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2015, pukul 20.19 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51375eae3c7d/asas-lex-specialis-vs.-lex-superior> diakses pada tanggal 19 Mei 2015, pukul 20.19 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa0a5a5e0f60/masalah-hak-wni-keturunan-Tionghoa-untuk-memiliki-tanah-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 23.15 WIB